



Schmburgan -

menggaji GTT. Sehingga mulai menggaji GTT. Sehingga mulai Januari 2016 nanti mereka akan mendapat gaji dengan kisaran antara Rp 1,1 juta hingga Rp 1,2 juta. "Kalau anggaran Rp 9,8 miliar itu diajukan oleh Dinas Pendidikan dulu, dan tadi itu sudah disepakati untuk menggaji 667 guru tidak untuk menggaji 667 guru tidak tetap SD mulai Januari 2016,"

ujar Pebriantara

Pebri menambahkan, 667 guru tersebut hanya untuk tingkat SD, sementara guru tingkat SMP yang juga mendaftar akan kembali dibahas dalam pertemuan selan-jutnya. "Kalau guru SMP yang juga mendaftar itu akan kami bahas lagi. Sementara untuk 667 guru SD kini tinggal menunggu penetapan pada sidang paripurna dan persetujuan KUA dan PPAS untuk di ketok palu," katanya.

Hal senada disampaikan Sekda Gianyar I.B. Gaga Adi Saputra bahwa keputusan tersebut diambil berdasarkan kesepakatan dengan Dewan Gianyar, karena selisih sangat tipis antara kebutuhan guru dengan yang lulus seleksi verifikasi. "Saat rapat tadi dewan menyampaikan dari selisih yang tipis ini sangat disayangkan kalau ada guru yang dieliminasi lagi. Jadi, tanpa mengabaikan sistem kami eksekutif setuju dengan catatan proses seleksi tetap dilakukan," ucapnya. (kmb35)

Edisi : Selosa, 20 Oktober 2015 : 9 Hal







GAJI GTT - Ketua Komisi IV DPRD Gianyar Putu Pebriantara (kiri) didampingi anggota Komisi IV Ni Made Ratr apat Banggar di Kantor Dewan Gianyar, Senin (19/10) kemarin. Banggar menyetujui Rp 9,8 miliar untuk ga

Banggar Setujui Rp 9,8 Miliar untuk Gaji 667 GTT

Gianyar (Bali Post) -Tercatat 667 guru SD di Kabupaten Gianyar dinyatakan lolos dalam proses verifikasi pendaftar seleksi guru tidak tetap (GTT). Sementara dalam rapat Banggar yang berlangsung di Kantor Dewan Gianyar, Senin (19/10) kemarin, disepakati agar seluruh guru SD tersebut langsung diloloskan dalam tes seleksi GTT yang direncanakan November 2015 mendatang.

Darijumlah guru yang lolos antara yang lolos verifikasi kan nanti tetap berlangsung. itu, juga disepakati anggaran dengan kekurangan guru SD Fungsinya untuk pemetaan

Gianyar Putu Pebriantara Gianyar Putu Pebriantara mengatakan, dalam rapat Banggar yang dihadiri oleh eksekutif dari Pemkab Gianyar ini, sudah disepakati bahwa 667 guru yang lolos seleksi mengatakan, dalam rapat Banggar tersebut di Kabupaten Gianyar mulai 2016 nanti, katanya.

Meski semua guru tersebut dipastikan lolos, kata Pebri, proces adalah ingatikan lolos, kata Pebri, processal kata Pebri, proc

ena melihat tipisnya selisih

di kabupaten Gianyar yakni kualitas guru. Kalau ada kualyar, untuk menggaji mereka 665. Sehingga dalam rapat itas guru yang kurang, nanti ulai Januari 2016. Ketua Komisi IV DPRD bila 667 guru SD tersebut di-Dinas Pendidikan, "jelasnya."

667 guru yang lolos seleksi verifikasi dari 669 pendaftar itu, diloloskan dalam seleksi GTT selanjutnya.

"Hali ini dilah lalah dari dipastikan lolos, kata Pebri, proses seleksi untuk guru GTT di Kabupaten Gianyar tetap akan dilangsungkan di BKN Denpasar pada November T selanjutnya.
"Hal ini dilakukan kar2015 nanti. "Tes yang diada-

: Sedasa 20 Oktober 2015

Hal



Kabareskrim Polri Janji Seret Tersangka Lain

★ Terkait Dugaan Korupsi Pengadaan Lahan BP3TKI Denpasar



TERDAKWA, Kepala BP3TKI Denpasar, Wayan Pageh (kiri belakang) saat dengarkan keterangan saksi dalam sidang di Pengadilan Tipikor Denpasar, beberapa waktu lalu.

DENPASAR, NusaBali

Sidangkasus dugaan markuplahan untuk kantor BP3TKI (Balai Pelayanan Pentempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia) Denpasaryang disebut majelis hakim banyak kejanggalan ditanggapi serius oleh Kabareskrim Mabes Polri, Komjen Anang Iskandar. Bahkan ia memastikan akan mem-proses pihaklainnya yang terlibat sesuai fakta persidangan.

Hal ini ditegaskan Komjen Anang dalam acara Pelatihan Bersama Kapasitas Penegak Hukum dalam Penanganan Tipikor yang diselenggarakan di Hotel Sanur Paradise, Sanur, Denpasar pada, Senin (19/10). Ia mengatakan pihaknya sangat serius menangani kasus yang

sudah menyidangkan dua terdakwa, yaitu Kepala BP3TKI Denpasar, Wayan Pageh dan Priyo Adi Santoso.

Sementara dua tersangka lainnya, yaitu pemilik tanah, Gede Nyoman Paramartha dan Ketua Panitia Pengadaan Lahan, Trusdi Prio Sambodo. "Kami menangani dengan serius kasus ini," tegasnya. Komjen Anang mengatakan sampai saat ini baru 4 tersangka saja yang bisa ditetapkan sebagai tersangka dan dua sudah masuk persidangan. Terkait nama baru dengan nama Wahyu Matondang alias Dodik masihakan menunggu fakta persidangan.

"Jika memang dalam fakta persidangan terbukti ada aliran dana, pasti kami jadikan tersangka," pungkasnya.

Seperti diketahui sebelumnya, dalam sidang untuk dua terdakwa, yaitu Ketua BP3TKI, Pageh dan PPK, Prio Adi Santoso terungkap dua nama baru sebagai pengatur mark up lahan dan penerima aliran dana hasil mark up. Keduanya Wahyu Matondang alias Dodik yang disebut sebagai otak korupsi mark up lahan BP3TKI (Badan Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia) Denpasar dan Ins-pektorat Jenderal di BNP2TKI Jakarta, Mangasi Simanjuntak yang disebut sebagai atasan Dodik.

Dalam sidang yang digelar, Rabu (7/10) lalu, Dodik yang sebelumnya disebut sebagai otak korupsi karena mengatur kenaikan harga tanah dari Rp 4,5 miliar menjadi Rp 6,7 miliar dan menerima aliran uang hasil korupsi Rp 1,5 miliar langsung membantahnya. Malah Dodik terus menyebut nama Inspektorat Jenderal di BNP2TKI Jakarta, Mangasi sebagai atasan yang mengajaknya dalam pengadaan lahan BP3TKI Denpasaryang berujung mark up Rp 2,2 miliar.

Hakim yang memimpin sidang Tipikor, Edward Harris Sinaga sempat menanyakan status Dodik dan Mangasi dalam kasus korupsi dengan dua terdakwa, yaitu Kepala BP3TKI Denpasar, Wayan Pageh dan Priyo Adi Santoso. Namun jaksa mengatakan jika keduanya masih berstatus saksi dan penyelidikan dilakukan Mabes Polri. Sementara dalam penyidikan di Polda Bali untuk dua tersangka lainnya, Dodik dan Mangasi juga masih menjadi saksi. 🖮 rez

Edisi OUT Selata 2011 Hal





Penanganan Korupsi Masih Ada Sekat

Revisi UU KPK Dapat Dilakukan Dalam Rangka Penguatan, Bukan Pelemahan

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melalui program koordinasi supervisi bidang penindakan, sangat berharap hilangnya sekat-sekat antara KPK dengan isntansi lainnya, seperti polisi dan kejaksaan. Karenanya, KPK memelopori untuk melakukan pelatihan bersama peningkatan kapasitas penegak hukum dalam penanganan tindak pidana korupsi di Sanur, Senin (19/10) kemarin.

Plt. Ketua KPK Taufiequrachman Ruki dalam keterangan persnya mengatakan memang hingga saat ini masih ada sekatsekat dalam penanganan ko-rupsi. 'Ditanya apakah masih ada sekat-sekat, jawaban saya masih. Tetapi sekat-sekat sekarang tidak setebal 12 tahun yang lalu," katanya.

Dia mencontohkan KPK jilid I dahulu, KPK sangat sulit berkomunikasi dengan kepolisian, kejaksaan, BPK dan BPKP. Namun kemudian pelan-pelan, saat ini sekat-sekat ini sudah semakin cair, dan tidak lagi ada ego sektoral. Dijelaskan, seiring waktu, sekat ini masih ada sedikit, namun sudah mencair, karena ingin penanganan korupsi lebih tepat. "Sekarang sudah tidak ada lagi keluhan penyidik polri tentang P19. Karena saya sudah minta pada kejaksaan agung, begitu keluar SPDP, saya minta kejaksaan mulai bertanya, kasusnya ini apa, minta ke BPKP tentang kerugian negara. Jadi ini bisa mengatasinya," kata Taufiequrachman Ruki. Pasalnya, dia bersama instansi lain berkomitmen dalam penanganan kasus korupsi, agar cepat seperti jalan tol Bali Mandara.

Bagaimana soal rencana

revisi UU KPK? Taufiequrachman Ruki mengatakan UU KPK itu bukanlah kitab suci. Maka, janganlah bersikap bahwa UU KPK tidak dapat disentuh. "Revisi dapat dilakukan, tetapi dalam rangka perkuatan. Bu-kan dalam rangka pelemahan," katanya.

Dia mengatakan, jangan melakukan revisi UU KPK dengan pikiran yang liar. Pada kesempatan itu, Ketua KPK mencoba menerangkan sejumlah hal, seperti KPK dalam penanganan perkara terdakwanya tidak ada yang bebas dari putusan pengadilan. Walau ada praperadilan yang kalah, KPK mengaku sudah berbenah dengan melakukan koreksi. Soal dewan pengawas, siapa yang mengawasi perlu diatur dalam undang-undang, tanpa menjadi celah untuk dilakukan intervensi terhadap pelaksaan petugas KPK. "KPK adalah lembaga independen, tidak boleh diintervensi oleh siapapun, termasuk dewan pengawas. Tetapi KPK tidak boleh berbuat seenaknya tanpa pengawasan,' jelasnya

Begitu juga soal SP3. Dari sisi hukum dimungkinkan untuk melakukan penghentian penyidikan perkara, Taufiequrachman Ruki mengatakan, SP3 itu bisa dilakukan, apabila tersangkanya mati, apabila perkara sudah kedaluarsa, atau perkembangan terbaru tersangkanya stroke atau mental

dan moralnya jatuh. "Ini sudah masuk HAM," jelasnya. Soal penyidik independen, pihak KPK akan mempelajari lebih jauh, apakah bisa me-

: 3dosa, 20 Oktober 2015 Edisi Hal

Sub Bagian Humas dan Tata Usaha BPK RI Perwakilan Provinsi Bali



Bali Post



Samburgan - -

nyediakan penyidik sendiri atau tetap dari unsur polri dan kejaksaan. Dan terakhir soal penyadapan. "Yang dilakukan KPK adalah KPK diberikan kewenangan oleh UU. Namun tata cara penyadapannya juga diatur UU, bagaimnana penyadapan itu dilakukan," sebutnya. Intinya, UU KPK boleh dilakukan, asal terjadi penguatan. Buka pelemahan.

Untuk menguatkan komitmen KPK dalam memberantas korupsi, serta menghindari terjadinya sekat-sekat, kemarin dilakukan pelatihan peningkatan kapasitas penegakkan hukum dan sinergi antar penegak hokum yakni KPK, Polri dan Kejaksaan. Sebab, salah satu kunci keberhasilan dalam penanganan korupsi adalah menjunjung tinggi nilai profesional, integritas, pengawasan yang efektif fan penerapan sanksi yang tegas untuk menimbulkan efek jera.

Hadir dalam pelatihan itu Kabareskrim Anang Iskandar, Jampidsus R. Widyo Pramono, Kepala BPKP Ardan Adiperdana, anggota III BPK Edy Mulyadi Soerpardi, Wakil Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Agus Santoso.(Kmb37)



PELATIHAN BERSAMA - Plt. Ketua KPK Taufiequrachman Ruki (tengah) menjawab pertanyaan wartawan pada konferensi pers pelatihan bersama peningkatan kapasitas penegak hukum dalam penanganan tindak pidana korupsi, di Denpasar, Senin (19/10) kemarin.

Edisi : Schoon, 20 Oktober 2015

Hal : 6





Soal Selisih Anggaran hingga Rp 37 Miliar

Bappeda dan Litbang Tolak Berikan Penjelasan



I Wayan Suambara

Mangupura (Bali Post) –
Kepala Bappeda dan Litbang I Wayan Suambara akhirnya memenuhi undangan Komisi III DPRD Badung, setelah empat kali tak hadir dalam rapat pembahasan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) 2016. Sayangnya dalam pertemuan, Senin (19/10) kemarin, di ge-

dung dewan Badung, pejabat asal Denpasar itu menolak memberikan penjelasan terkait adanya selisih anggaran Rp 37 miliar KUA dan PPAS. Wayan Suambara berdalih jika kehadirannya bersama jajaran untuk memenuhi undangan dewan dalam rangka rapat kerja antara Komisi III dengan Bappeda. Sedangkan KUA dan PPAS merupakan rangkaian dokumen penyususnan RAPBD yang secara substansi menjadi kompetensi dan kewenangan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).

Suambara juga menjelaskan, sebelum bertemu dengan Komisi III, pihaknya telah mendapatkan petunjuk dan arahan dari Penjabat Bupati agar tidak memberikan penjelasan tentang KUA dan PPAS dan RAPBD, karena merupakan kompetensi TAPD. "Sebenarnya sudah tidak ada masalah (masalah selisih anggaran – red). Karena itu

kan sudah menjadi kesepakatan eksekutif dan legislatif," ucap Suambara usai bertemu Komisi III.

Dijelaskan, rancangan KUA dan PPAS yang diusulkan adalah Rp 3,5 triliun lebih, di mana dalam perjalanan ada pembahasan serta usulan dan aspirasi dewan, sehingga akhirnya ada tambahan dana lagi Rp 37 miliar. "Kami tidak berani main-main. Karena angka inilah yang sudah diteken dalam paripurna. Kami mengakomodir aspirasi dewan. Tidak berani main-main sepeser pun," katanya.

Ia pun mengakui, mengantongi dokumen hasil rapat pembahasan lengkap KUA dan PPAS itu dengan dewan. Sejumlah usulan tambahan yang muncul saat pembahasan KUA dan PPAS, di antaranya pembelian mobil tangga senilai Rp 14 miliar serta pengadaan baju endek untuk guru senilai Rp 3,8

miliar. "Ada kok dokumennya. Kami juga tidak tahu apanya yang dipertanyakan dewan. Tapi, model rinciannya besok (hari ini - red) dijelaskan," tegasnya.

Ketua Komisi III Nyoman Satria didampingi satu anggotanya Made Sudarta dalam rapat mengakui dewan tidak pernah membahas dana Rp 37 miliar, namun dalam KUA dan PPAS tiba-tiba nongol. Dewan juga merasa tidak pernah membahas itu. "Oke, kalau Bappeda dilarang memberi penjelasan oleh penjabat bupati, besok (hari ini - red) TAPD akan kami undang mengenai selisih dana ini. Biar terbuka secara keseluruhan," tegasnya.

keseluruhan," tegasnya.

Komisi III DPRD Badung pun akhirnya menutup rapat. Bahkan, langsung memerintahkan pihak sekretariat dewan menyiapkan undangan rapat ke Pj. Bupati Nyoman Harry Yudha Saka. "Mohon maaf

kalau rapat kami tunda. Besok kami akan undang TAPD dan penjabat bupati," tegasnya. Satria dalam kesempatan itu

Satria dalam kesempatan itu juga membantah selisih dana Rp 37 miliar sudah berdasarkan kesepakatan bersama. Menurutnya, dana itu muncul tanpa sepengetahuan dewan. "Itu sepihak. Buktinya blangko penambahan 37 miliar itu tidak ada. Yang ditandatangani pimpinan itu adalah Rancangan KUA/PPAS saja," jelasnya.

Satria juga mengakui sempat ditugaskan oleh Ketua DPRD Badung I Nyoman Giri Prasta kala itu untuk membahas selisih dana yang cukup besar itu. "Pak ketua dewan justru menugaskan saya waktu itu. Kalau memang ada, kapan dibahas? Saya tidak ngerti," tanyanya seraya menyebutkan, dalam rapat kerja ini anggota Komisi III tidak harus kuorum. Karena yang mengatur rapat adalah pimpinan komisi. (kmb27)

Edisi : Selwa, 28 Ont 2015
Hal : 8

Radar Bali



Terkait Serapan APBD yang Rendah

DENPASAR - Ada lontaran menarik dari Ketua Komisi Pemberantas Korupsi (KPK), Taufiequrrahman Ruki terkait serapan anggaran pendapatan belanja. Pernyataan disampaikan saat acara bertajuk "Pelatihan Bersama Kapasitas Penegak Hukum Dalam Penanganan Tipikor" di Sanur Pardise Plaza, Senin kemarin.

Dalam acara ini, Ketua KPK Taufiequrrahman Ruki mengatakan bahwa jika ada pejabat yang mengatakan serapan APBN atau ABPD rendah gara – gara takut diperiksa penegak hukum, itu adalah pernyataan bullshit alias omong kosong. Dia menegaskan hal tersebut di forum acara KPK bersama pihak Mabes Polri, Kejagung, PPATK, BPKP dan BPK RI.

Dalam acara yang dihadiri Jampidsus Kejagung R.Widyo Pramono, Kabareskrim Mabes Polri Komjen Anang Iskandar, Kepala BPKP Ardan Adiprana. Ada juga anggota III BPK Eddy Mulyadi Soepardi dan Wakil Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Agus Santoso.

Di hadapan 180 peserta pelatihan, Ruki memberi sambutan. Dia di kesempatan ini menyatakan bahwa peserta pelatihan jangan *ngumpul* sesama korps saja. Yang polisi dengan polisi saja, jaksa dengan jaksa saja, dan seterusnya.

Begitu juga auditor jangan sendiri - sendiri

Baca Ruki... Hal 31

Alasan Takut Diperiksa Dinilai Aneh

RUKI...

Sambungan dari hal 21

"Jangan ada sekat, jangan ada ego. Ngobrollah, tukar nomor telepon. Tujuan kita sama untuk pemberantasan korupsi. Asalkan bukan untuk meringankan tuntutan. Namun tetapkan untuk koordinasi," ungkap pensiunan Inspektur Jenderal Polisi ini.

Dia juga mengharapkan agar, penyelidik, penyidik dan auditor agar menghilangkan urat takutnya. Jangan sampai takut untuk memberantas korupsi. Namun jangan juga "memainkan" mereka. "Misalnya ada tersangka sampai bertahun tahun, tetapkan tersangka, tahan. Kami belum ada kasus

lepas. Kecuali pra peradilan (kasus Budi Gunawan) yang membuat kami mematangkan lagi strategi," urainya.

Dia juga menguraikan sorotannya bahwa saat ini ketika serapan APBN dan APBD dengan banyaknya Silpa (Sisa Lebih Penggunaan Anggaran) malah menyalahkan penegak hukum. Baginya ini sangat aneh, ketika penegak hukum digunakan sebagai alasan.

"Ada alasan begini. Kami takut diperiksa, makanya kami tidak berani menjalankan proyek, Itu menurut saya bullshit," ungkapnya, yang langsung disambut tepuk tangan. Maklum, selama ini memang banyak didesas-desuskan bahwa serapan dana

APBD hanya sedikit, karena takut pemeriksaan dan bisa terjerat korupsi.

Dia mengatakan, rasa takut itu adalah karena ada pikiran kotor dan perbuatan yang dilakukan melanggar. "Itu karena ada pikiran kotor, dan memang ada niat untuk menguntungkan orang lain dan diri sendiri. Makanya takut menjalankan program," lanjut Ruki, menegaskan.

Selain itu, dalam sesi tanya jawab dengan wartawan, juga memaparkan bahwa sampai saat ini posisi Polri, Kejaksaan dan KPK semakin tipis sekatnya. "Mungkin sekat untuk dinolkan sulit. Namun semakin tipis," jelasnya.

Bagaimana dengan rencana revisi UU KPK? Dia menjawab dengan tegas, baginya tidak masalah ada revisi lantaran bukan kitab suci. Namun dia mengatakan revisi adalah untuk menguatkan, bukan untuk melemahkan apalagi untuk meniadakan. "Jadi silakan revisi, untuk menguatkan, untuk memperkokoh langkah pemberantasan korupsi. Bukan untuk dilemahkan," cetusnya.

Dia juga menekankan salah satu kunci keberhasilan pemberantasan tindak pidana korupsi adalah upaya yang-luar biasa dari aparat penegak hukum untuk menjunjung tinggi nilainilai profesionalitas, integritas, pengawasan yang efektif. Juga

Edisi: Minggo, 18 Onbbr 2017
Hal.: 21 don 31